Dana Program Restrukturisasi Perbankan Rp 372 Triliun

Oleh Gita Rossiana

▶ JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai, dana untuk program restrukturisasi perbankan (PRP) umumnya berkisar 2-3% dari produk domestik bruto (PDB). Jika merujuk pada nilai PDB tahun 2016 yang mencapai Rp 12.406 triliun, dana PRP sekitar Rp 248,12 triliun hingga Rp 372,128 triliun.

Direktur Eksekutif LPS Fauzi Ichsan menjelaskan, kisaran 2-3% dari PDB berdasarkan perhitungan historis yang sudah dikeluarkan LPS dalam menyelamatkan bank. "Kami *kan* punya pengalaman krisis pada 1998 ketika banyak bank perlu diselamatkan," kata Fauzi di Jakarta, pekan lalu.

Sementara itu, mengenai besaran premi PRP yang dikenakan kepada perbankan, menurut Fauzi masih dalam pembahasan. "Premi PRP akan dikeluarkan dalam bentuk peraturan pemerintah, namun diskusinya harus melibatkan BI, OJK, dan juga DPR," ujar dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Dengar Pendapat dengan DPR sebelumnya menjelaskan, dalam *Undang-Undang* Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) disebutkan, dana untuk program restrukturisasi perbankan berasal dari bank dan kontribusi perbankan. Sementara itu, premi untuk program restrukturisasi tersebut ditetapkan dalam peraturan pemerintah (PP).

"Di dalam UU tersebut juga di-

■ Fauzi Ichsan

jelaskan mengenai premi ini harus dikonsultasikan dahulu kepada DPR, sebelum ditetapkan dalam peraturan pemerintah," kata Sri Mulyani.

Adapun besaran premi untuk PRP, pihaknya merujuk pada praktik yang ada di luar negeri. Di Swedia, metode yang ditetapkan adalah *flat rate*, sedangkan di Jerman berdasarkan ukuran bank. Selanjutnya, di Uni Eropa, premi didasarkan pada risiko bank, Jepang dan Korea juga berdasarkan *flat rate*, serta Hungaria dan Austria menganut konsep berjenjang.

Menanggapi mengenai PRP, Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Iman Nugroho Soeko mengungkapkan, penetapan premi PRP tidak melalui diskusi dengan perbankan. "Sepertinya tidak ada diskusi, mereka langsung saja menetapkan," ujar dia.

Iman berpendapat, pada satu tahun pertama dana yang diperlukan untuk PRP tidak langsung mencapai 2-3% dari PDB. "Soalnya kami tidak mengharapkan krisis terjadi dalam waktu dekat. Pokoknya kami ingin serendah mungkin," kata dia.

Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan, ada beberapa mekanisme untuk menahan perbankan dari risiko kegagalan. Mekanisme pertama adalah dengan peningkatan permodalan. Menurut dia, rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio*/CAR) perbankan saat ini sudah berada di atas batas minimal yang ditentukan, yakni 22%. Dengan nilai tersebut, permodalan perbankan cukup memadai untuk mengantisipasi berbagai risiko.

Selanjutnya, LPS saat ini memiliki dana untuk menjamin dana masyarakat sekitar Rp 60-70 triliun. Dana itu, menurut dia, sudah cukup untuk menanggulangi risiko kegagalan bank saat ini. "Risiko sistemik juga tidak terlalu besar saat ini," kata dia.

Terlebih lagi, Kartika atau yang akrab disapa Tiko mengungkapkan, pasca terbitnya Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK), bank dituntut untuk menyusun *recovery plan* dan menganut sistem *bail-in* apabila terjadi risiko kegagalan bank. "Kalau sudah ada komitmen bank untuk menangani risiko kegagalan, bentengnya sudah berlapis," jelas dia.

Meski pun pemerintah tetap menarik dana untuk Program Restrukturisasi Perbankan (PRP), menurut dia, seharusnya tidak ditarik dalam waktu dekat, namun ketika dibutuhkan. "Misalnya, pemerintah membutuhkan *buffer* sekitar 1% dari PDB atau sekitar Rp 100 triliun, dana tersebut seharusnya bisa di-*stretch* penarikannya misalnya dalam 20 tahun, bukan dalam lima tahun," ungkap dia.

Lebih lanjut, Direktur Utama BTN yang juga Ketua Umum Himpunan Bank Negara (Himbara) Maryono mengungkapkan, tingkat suku bunga perbankan saat ini masih tinggi karena bank harus meng-*cover* biaya *overhead* yang besar akibat kondisi geografis Indonesia. Belum lagi, perbankan juga dipungut biaya premi penjaminan LPS, iuran OJK dan kewajiban penempatan giro wajib minimum (GWM) yang tanpa bunga.

Menurut dia, apabila premi ni bisa disatukan, maka bisa membuat tingkat efisiensi perbankan meningkat. Apalagi, OJK saat ini juga mengemban tugas yang sebelumnya berasal dari BI dan Kementerian Keuangan sehingga seharusnya bisa mengurangi iuran yang dikenakan. "Kalau preminya digabung, baru dibagi sesuai kebutuhan tentunya akan menjadi lebih efisien," tegas Maryono.

Investor Daily/GAGARIN

Pembiayaan Griya BSM

Senior Executive Vice President (SEVP) Bank Syariah Mandiri (BSM) Niken Andonowarih dan Direktur PT Jaya Real Property Tbk Swandayani usai menandatangani perjanjian kerja sama di Jakarta, pekan lalu. Perjanjian meliputi pemasaran dan fasilitas pembiayaan BSM Griya untuk konsumen perorangan yang akan membeli rumah di proyek perumahan Bintaro Jaya dan Graha Raya. Outstanding pembiayaan Griya BSM per Maret 2017 adalah sebesar Rp9,27 triliun dengan jumlah nasabah mencapai 44 ribu.

BNI Sediakan Layanan e-PBB untuk Pemkot Surakarta

JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dan Pemerintah Kota Surakarta, Jawa Tengah, menandatangani perjanjian nota kesepahaman tentang penyediaan dan penggunaan layanan jasa perbankan, serta kerja sama tentang pembayaran pajak khususnya pajak bumi dan bangunan melalui *e-channel* (e-PBB). Layanan e-PBB ini menjadi salah satu bentuk dukungan BNI terhadap program Pemerintah Kota Surakarta untuk menjadikan kota ini sebagai *smart city*.

Penandatangan kerja sama tersebut dilakukan oleh Walikota Surakarta FX Hadi Rudyatmo dan CEO BNI Kantor Wilayah Yogyakarta Arif Suwasono, di Loji Gandrung, pada 26 Mei 2017. Acara tersebut disaksikan oleh Direktur Utama BNI Achmad Baiquni, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Surakarta Bandoe Widiarto, dan Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Surakarta Laksono Dwionggo. Pada acara ini secara simbolik dilaksanakan demo transaksi pembayaran PBB melalui berbagai *channel* BNI.

Kolaborasi Pemerintah Kota Surakarta dengan BNI tersebut semakin mendekatkan rencana Kota Surakarta menjadi salah satu *smart city* di Indonesia, yaitu konsep kota cerdas yang dirancang guna membantu berbagai hal kegiatan masyarakat, terutama dalam upaya mengelola sumber daya yang ada dengan efisien, serta memberi kemudahan mengakses informasi bagi masyarakat. Kerja sama seperti ini dapat menjadi model percontohan pengembangan kota di Indonesia yang didukung oleh BNI dengan berbasis pada teknologi informasi (*digital system*).

"Sebagai bentuk perkembangan layanan dan upaya untuk memperkuat posisi BNI sebagai *banking partner* bagi Pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan Smart City, BNI menghadirkan Layanan perbankan dalam pembayaran e-PBB," ujar Achmad Baiquni dalam siaran pers yang diterima *Investor Daily*, akhir pekan lalu. (*th*)

KABELINDO

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT KABELINDO MURNI Tbk.

Direksi PT Kabelindo Murni Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yaitu:

A. Tanggal, Waktu, Tempat, dan Agenda Rapat
Tanggal : 24 Mei 2017
Waktu : 11.15 - 12.00 WIB
Tempat : PT Kabelindo Murni Tbk. Jl. Rawa Girang No. 2 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur 13930
Agenda Rapat :
1. Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya pengurusan Perseroan selama Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2016;
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Tahun Buku 2016 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016;
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016;
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2017;
5. Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
6. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah :
Direksi
Presiden Direktur : Ibu Ely Soepono
Direktur Independen : Bapak Tan Robert Tanto
Direktur : Ibu Veronica Lukman
Direktur : Bapak Petrus Nugroho Dwisantoso
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Bapak Soepono
Komisaris Independen : Bapak D.N. Adnyana
Komisaris : Bapak Budi Setiono Santoso

C. Kuorum Kehadiran
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah yang berjumlah 956.768.990 saham atau mewakili 85,43 % dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

D. Tanya Jawab
Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap agenda Rapat.

E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat
Tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap agenda Rapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara
Rapat secara musyawarah untuk mufakat telah memutuskan untuk menyetujui usulan acara pertama sampai dengan acara keenam.

H. Keputusan Rapat
Agenda Rapat Pertama dan Kedua:
- Karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara blanko, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan untuk Mata Acara Rapat ke-1 dan ke-2 disetujui dengan musyawarah untuk mufakat sebagai berikut:
Menerima dengan baik Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku 2016 termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2016 atau yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan sebagaimana termuat dan suratnya No. AR/L-206/17 tanggal 24 Maret 2017 dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian.
Dengan diterimanya Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2016, dan Pengesahan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan Kepengurusan dan Pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2016 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.

Agenda Rapat Ketiga:
Karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara blanko, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan untuk Mata Acara Rapat ke-3 disetujui dengan musyawarah untuk mufakat sebagai berikut:
Menggunakan keuntungan bersih tahun 2016 sebesar Rp 21.206.859.360, sebagai berikut :
- Sebesar Rp 5.600.000.000,- dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2016 yang akan dibagikan kepada 1.120.000.000 saham, sehingga setiap saham mendapat dividen tunai sebesar Rp 5,-.
- Sebesar Rp 200.000.000,- untuk Dana Cadangan.
- Sedangkan sisanya sebesar Rp 15.406.859.360,- dibukukan sebagai Laba Ditahan.
Pembagian dividen akan dilakukan pada tanggal 23 Juni 2017 dengan cara membayar dividen tunai (cash dividen) sejumlah Rp 5,- setiap saham kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Juni 2017 pukul 16.15 WIB dengan cara pembayaran sebagai berikut :
- Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif di KSEI, pembayaran akan dilakukan melalui rekening pemegang saham pada pemegang rekening di KSEI;
- Untuk pemegang saham yang belum tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI, pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek khusus yang bisa diambil di kantor Perseroan pada jam-jam kerja.
Bagi para pemegang saham yang menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui Bank Transfer diminta untuk mengajukan surat tertulis dan mengirimkan Nomor Rekening Bank kepada Perseroan.
Untuk pembagian dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib dibayar Perseroan.
Rapat memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.

Agenda Rapat Keempat:
Karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara blanko, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan untuk Mata Acara Rapat ke-4 disetujui dengan musyawarah untuk mufakat sebagai berikut:
Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2017 dan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya, dengan memperhatikan kewajaran serta lingkup pekerjaan audit serta menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya, jika Kantor Akuntan Publik (KAP) Anwar & Rekan tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan karena sebab apapun berdasarkan Ketentuan besaran imbalan jasa audit.

Agenda Rapat Kelima:
Karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara blanko, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan untuk Mata Acara Rapat ke-5 disetujui dengan musyawarah untuk mufakat sebagai berikut:
Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem/bonus bagi para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda Rapat Keenam:
Karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara blanko, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan untuk Mata Acara Rapat ke-6 disetujui dengan musyawarah untuk mufakat sebagai berikut:
- Menerima pengunduran diri Bapak TAN ROBERT TANTO selaku Direktur Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Bapak TAN ROBERT TANTO.
- Mengangkat kembali Ibu ELLY SOEPONO, Ibu VERONICA LUKMAN masing-masing sebagai Presiden Direktur dan Direktur Perseroan serta mengangkat Bapak PETRUS NUGROHO DWISANTOSO sebagai Direktur Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020 Sehingga Susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Presiden Direktur : Ibu ELLY SOEPONO
Direktur : Ibu VERONICA LUKMAN
Direktur Independen : Bapak PETRUS NUGROHO DWISANTOSO
- Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyalakan pengangkatan anggota Direksi dengan susunan sebagaimana disebut dalam Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan mendaftarkan susunan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas kepada instansi yang berwenang dan mencatatkannya dalam Daftar Perusahaan.

I. Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai
Sehubungan dengan hasil keputusan pada Agenda Rapat Ketiga, dengan ini kami sampaikan keterangan tambahan sebagai berikut:
Periode Cum Dividen:
- Perdagangan pada Pasar Reguler : tanggal 2 Juni 2017
- Perdagangan pada Pasar Tunai : tanggal 7 Juni 2017
Periode Ex. Dividen:
- Perdagangan pada Pasar Reguler : tanggal 5 Juni 2017
- Perdagangan pada Pasar Tunai : tanggal 8 Juni 2017
Pencatatan Recording Date : tanggal 7 Juni 2017
Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai : tanggal 23 Juni 2017

Jakarta, 24 Mei 2017
Direksi
PT KABELINDO MURNI Tbk.

WIKA BETON
Innovation and trust

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT WIJAYA KARYA BETON TBK

Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk, berkedudukan di Kota Bekasi dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 di Main Hall Gedung Bursa Efek Indonesia Jalan Jend.Sudirman Kv.52-53, Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut Rapat) PT Wijaya Karya Beton Tbk. (selanjutnya disebut Perseroan).

Rapat dibuka pada pukul 14.44 WIB. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu:

A. Anggota Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	: Gandira Gutawa Sumapraja	Direktur Utama	: Hadian Pramudita
Komisaris	: Agustinus Boediono	Direktur	: Hari Respati
Komisaris	: Tumik Kristianingsih	Direktur	: Mohammad Syafii
Komisaris Independen	: Asfah Mahdiani	Direktur	: Kuntjara
Komisaris Independen	: Priyo Suprobo	Direktur	: Siddik Siregar
Komisaris Independen	: Yustinus Prastowo	Direktur Independen	: Sidiq Purnomo

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 6.254.559.249 saham atau sebesar 75,01 % dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah dikurangi dengan saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

C. Mata Acara Rapat
Mata acara Rapat adalah sebagai berikut :
1. Perubahan Pengurus Perseroan
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
3. Perubahan Penggunaan Dana IPO (Initial Public Offering)
Penjelasan mengenai mata acara Rapat adalah sbb:
1. Mata Acara Rapat ke-1 terkait dengan pernyataan berhenti Direktur Perseroan.
2. Mata Acara Rapat ke-2 terkait dengan pemindahan domisili Perseroan.
3. Mata Acara Rapat ke-3 terkait dengan rencana perubahan alokasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham yang masih tersisa pada tahun 2017 dialokasikan untuk Pengembangan Usaha sub kelompok pembangunan pabrik baru.

D. Kesempatan Tanya Jawab
Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap mata acara Rapat.
Pada Mata Acara Rapat kesatu sampai ketiga tidak ada yang mengajukan tanggapan, pertanyaan dan/atau pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

F. Keputusan Rapat
Adapun keputusan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.254.559.249 saham atau 100 % dari yang hadir	Tidak ada yang memberikan suara abstain	Tidak ada yang tidak setuju
Keputusan Rapat Pertama	1. Menyetujui Pengunduran Diri Sdr. Agung Yunanto selaku Direktur Perseroan pertanggal 31 Maret 2017 sebagaimana surat Pengunduran Diri yang bersangkutan, selanjutnya memberhentikan dengan hormat Sdr. Agung Yunanto selaku Direktur Perseroan dengan ucapan terimakasih atas pengabdiannya selama menjabat, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2017 2. Pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Sdr. Agung Yunanto selaku Direktur Perseroan atas tindakan pengurusan selama menjabat, pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 3. Mengangkat Sdr. Mursyid sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu. 4. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam suatu Akta Notaris tersendiri, memberitahukan perubahan data Perseroan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut. Sehingga selanjutnya susunan Direksi Perseroan adalah 1. Hadian Pramudita sebagai Direktur Utama; 2. Hari Respati sebagai Direktur; 3. Mohammad Syafii sebagai Direktur; 4. Kuntjara sebagai Direktur; 5. Mursyid sebagai Direktur; 6. Siddik Siregar sebagai Direktur; 7. Sidiq Purnomo sebagai Direktur Independen.		

Mata Acara Rapat Kedua			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.081.354.849 saham atau 97,23 % dari yang hadir	Tidak ada yang memberikan suara abstain	173.204.400 saham atau 2,77% dari yang hadir
Keputusan Rapat Kedua	1. Menyetujui Perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Pasal 1 ayat 1 tentang Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan menjadi berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Timur. 2. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk menyatakan perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar tersebut dengan cara menyusun kembali secara lengkap ke dalam Akta Notaris dan selanjutnya mengajukan pemeriksaan dan pelaporan serta pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		

Mata Acara Rapat Ketiga			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.254.559.249 saham atau 100 % dari yang hadir	Tidak ada yang memberikan suara abstain	Tidak ada yang tidak setuju
Keputusan Rapat Ketiga	Perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham sekitar 65% untuk ekspansi usaha yang terdiri dari : 1. Sisa penggunaan dana Pengelolaan Quarry Material Alam sebesar Rp. 19,79 miliar dialihkan ke Pembangunan Pabrik Baru. 2. Sisa penggunaan dana Pembangunan Pabrik Baru sebesar Rp. 14,79 miliar masih digunakan untuk tujuan penggunaan yang sama. 3. Sisa penggunaan dana Penambahan Kapasitas Pabrik Existing sebesar Rp. 8,42 miliar dialihkan ke Pembangunan Pabrik Baru. 4. Sisa penggunaan dana Pengembangan Usaha Jasa sebesar Rp. 2,05 miliar dialihkan ke Pembangunan Pabrik Baru. Dengan demikian sisa penggunaan dana yang dipergunakan Pembangunan Baru semula Rp. 14,79 miliar menjadi Rp.45,05 miliar.		

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 15.12 WIB.

Bekasi, 29 Mei 2017
PT Wijaya Karya Beton Tbk.
DIREKSI